

Pengaruh Dana Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Desa Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Moderasi

Region's Transfer
Fund and Poverty
Level

Saukani Hasan, Dadang Ishak Iskandar, Susti Rumianti
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ragam Tunas Kotabumi Lampung
EMail: saukanihasan75@gmail.com

707

Submitted:
NOVEMBER 2021

Accepted:
DESEMBER 2021

ABSTRACT

Poverty is a social problem that has always been an important issue in regional development programs because it is related to people's welfare. This research was conducted to determine the magnitude of the influence of Regions' Transfer Funds and Village Funds directly on the Poverty Level as well as by moderating Local Own-source Revenue in East Java during the period 2015–2021. The research population was 29 districts in East Java Province. Data with an observation span of 7 years resulted in 203 datasets in the form of historical data on Regional Original Income, Transfer Funds to Regions, Village Funds, and Regional Expenditures, and the number of poverty figures collected from the official website of the Ministry of Finance and Indonesia's central statistical agency. The data analysis method used is the SEM-PLS analysis model. The results showed that the Village Fund variable had a positive effect on the Poverty Level, but Regions' Transfer Funds had no effect while Local Own-source Revenue did not moderate the effect of Regions' Transfer Funds and Village Funds on Poverty Levels.

Keywords : Regions' Transfer Funds, Village Fund, Poverty Level, Local Own-source Revenue

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang selalu menjadi isu penting dalam program pembangunan daerah karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa secara langsung terhadap Tingkat Kemiskinan maupun dengan moderasi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur selama periode tahun 2015 hingga 2021. Populasi penelitian adalah 29 kabupaten di Provinsi Jawa Timur Data dengan rentang observasi 7 tahun sehingga didapatkan 203 dataset berupa data historis Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer ke Daerah, Dana Desa, dan Belanja Daerah, dan jumlah angka kemiskinan yang dikumpulkan dari website resmi kementerian keuangan dan badan pusat statistik Indonesia. Metode analisis data yang digunakan adalah model analisis SEM-PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dana Desa berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan, namun Dana Transfer ke Daerah tidak berpengaruh sedangkan Pendapatan Asli Daerah tidak memoderasi pengaruh Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan.

Kata Kunci : Dana Transfer ke Daerah, Dana Desa, Tingkat Kemiskinan, Pendapatan Asli Daerah.

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah serius di banyak daerah di Indonesia, di mana masih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan kesenjangan antara kaya dan miskin masih sangat besar. Kepala daerah dan pemerintah pusat telah berupaya untuk mengatasi masalah kemiskinan ini dengan berbagai cara, termasuk dengan mengucurkan dana melalui APBD untuk melaksanakan program pembangunan di daerah. APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Sumber pendanaan

JIMKES

Jurnal Ilmiah Manajemen
Kesatuan
Vol. 9 No. 3, 2021
pp. 707-712
IBI Kesatuan
ISSN 2337 – 7860
E-ISSN 2721 – 169X
DOI: 10.37641/jimkes.v9i3.2335

APBD dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi berbagai jenis pajak dan retribusi, serta dana kontribusi dari pemerintah pusat berupa dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

Selain itu, terdapat juga perbedaan kondisi ekonomi antara daerah satu dengan yang lainnya, sehingga penggunaan APBD yang efektif di satu daerah belum tentu efektif di daerah lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menyesuaikan program pembangunan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Upaya untuk mengatasi kemiskinan perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Selain itu, perlu juga diterapkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, seperti memperkuat sektor pertanian dan ekonomi lokal, meningkatkan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, dan membantu masyarakat miskin untuk memperoleh akses ke pasar dan peluang kerja yang lebih baik. Dalam hal ini, peran kepala daerah dan pemerintah pusat sangat penting dalam memastikan bahwa program-program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, serta dalam memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Selain itu, pemerintah perlu mendorong sektor swasta untuk berinvestasi di daerah-daerah yang kurang berkembang guna menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di beberapa daerah. Meskipun sumber pendanaan dan belanja daerah mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur masih fluktuatif dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan upaya yang lebih efektif dan efisien dalam mengelola sumber pendanaan APBD dan membelanjakan dana tersebut untuk program pembangunan yang tepat sasaran. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) adalah sumber pendanaan utama APBD. PAD adalah pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah tersebut, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain sebagainya. Sedangkan TKDD adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Kedua sumber pendanaan tersebut sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Realisasi PAD dan TKDD serta belanja daerah dapat digunakan sebagai indikator kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.

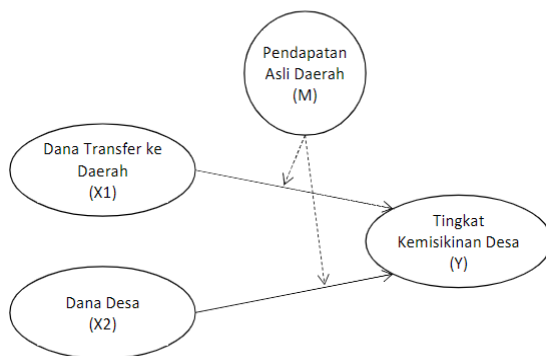
Semakin besar pendapatan daerah dan semakin efektif dan efisien penggunaan anggaran belanja daerah, semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun infrastruktur di daerah. Anggaran belanja daerah perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien agar dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Hal ini berarti bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan untuk belanja daerah harus dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengelola anggaran belanja daerah dengan baik, termasuk dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran. Dengan pengelolaan anggaran belanja daerah yang efektif dan efisien, pemerintah daerah dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki manajemen anggaran dan meningkatkan kualitas pelayanan publik demi tercapainya tujuan pembangunan yang diinginkan. Peningkatan penggunaan belanja daerah terhadap belanja modal dalam bentuk aset tetap dapat meningkatkan produktivitas perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi nilai belanja daerah yang digunakan dalam pembangunan, maka akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan penduduk serta penurunan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memperhatikan penggunaan belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur yang dapat

meningkatkan produktivitas perekonomian. Selain itu, pemerintah juga harus berupaya untuk meningkatkan ketersediaan lapangan kerja.

Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas pasar kerja dan memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja. Pemerintah juga perlu mendorong perkembangan sektor ekonomi kreatif sebagai sumber lapangan kerja baru. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Transfer Ke Daerah (DTKD) dan Dana Desa (DD) terhadap Tingkat Kemiskinan Desa pada kabupaten-kabupaten di wilayah Jawa Timur. Penelitian ini juga menambahkan variabel moderasi yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang akan mempengaruhi hubungan antara DTKD dan DD dengan tingkat kemiskinan desa. Dalam penelitian ini, PAD ditambahkan sebagai variabel moderasi karena PAD dapat mempengaruhi hubungan antara TKD dan DD dengan tingkat kemiskinan desa. Jika PAD tinggi, maka pemerintah daerah dapat menggunakan pendanaan tersebut untuk mengurangi tingkat kemiskinan desa. Namun, jika PAD rendah, pengaruh dari DTKD dan DD terhadap tingkat kemiskinan desa mungkin akan terpengaruh. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh DTKD dan DD terhadap tingkat kemiskinan desa di Jawa Timur, serta bagaimana peran PAD sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam mengatasi masalah kemiskinan di daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Kajian difokuskan pada 29 kabupaten di Provinsi Jawa Timur sebagai populasi dan sampel jenuh penelitian. Data historis tahun 2015 hingga 2020 yang digunakan antara lain informasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer ke Daerah, Dana Desa, dan Belanja Daerah, yang dikumpulkan dari website www.djpk.kemenkeu.go.id. Data jumlah angka kemiskinan juga digunakan yang dikumpulkan dari website www.bps.go.id. Data sekunder yang telah dikumpulkan untuk menggambarkan variabel dalam penelitian, dimana variabel eksogen adalah Dana Transfer ke Daerah (X1) dan Dana Desa (X2), dan variabel endogen adalah Tingkat kemiskinan Desa (Y). Setiap hubungan antara variabel eksogen dan endogen akan diuji pula pengaruh moderasi dari variabel Pendapatan Asli Daerah (M). Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan model analisis Partial Least Square (PLS), yaitu metode yang digunakan untuk memodelkan dan mengkonfirmasi teori. Metode PLS membutuhkan term dan asumsi yang lebih sedikit dibandingkan dengan Structural Equation Model (SEM) dan memiliki dua fungsi model yaitu inner model dan outer model. Inner model digunakan untuk menilai sebab dan akibat dari satu variabel terhadap variabel lainnya, sedangkan outer model digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas. Pada Gambar 1, menunjukkan model konseptual SEM-PLS yang akan diuji;

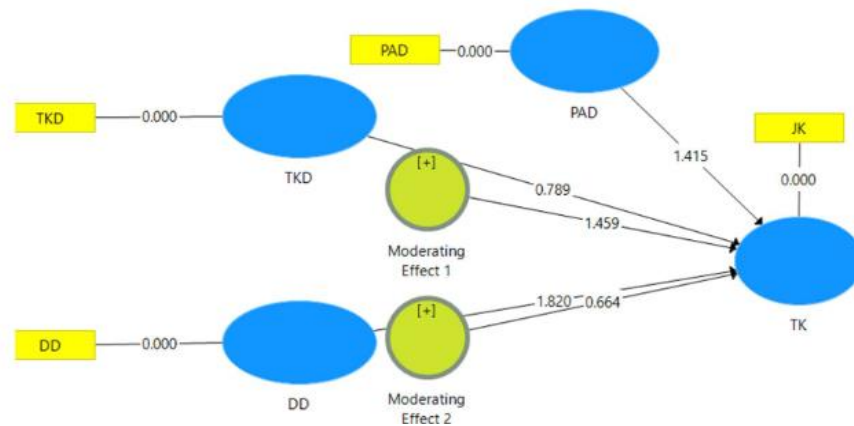


Gambar 1. Model konseptual SEM-PLS

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari pengujian model konseptual SEM-PLS menggunakan SmartPLS dihasilkan model path analysis sebagai berikut:

710



Gambar 2. Hasil Path Analysis

Untuk lebih mudah memahami gambar 2, maka dapat dilihat bacaan tabel seperti pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	Sample Me...	Standard D...	T Statistics (...)	P Values
DD -> TK	-0.211	-0.207	0.116	1.820	0.069
Moderating Effect 1 -> TK	-0.244	-0.216	0.167	1.459	0.145
Moderating Effect 2 -> TK	-0.133	-0.118	0.201	0.664	0.507
PAD -> TK	0.178	0.153	0.126	1.415	0.158
TKD -> TK	0.104	0.114	0.132	0.789	0.431

Dalam program SmartPLS, untuk menyimpulkan penerimaan dan penolakan suatu hipotesis dilakukan dengan melihat nilai Original Sample (O) untuk melihat arah pengaruh dari pengujian hipotesis, dan nilai p-values untuk melihat apakah pengaruh yang terjadi pada pengujian hipotesis bersifat signifikan atau tidak. Nilai O yang positif berarti pengaruhnya bersifat positif, dan jika nilai O negatif berarti arahnya pengaruhnya bersifat negatif. Suatu hipotesis dapat dinyatakan memiliki pengaruh yang signifikan apabila nilai p-values lebih kecil dari (<) 0,05.

PENUTUP

Dalam konteks pembangunan wilayah, teori menyatakan bahwa peningkatan Dana Transfer ke Daerah (DTKD), Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat membantu pemerintah daerah dalam membiayai proyek-proyek pembangunan dan memperbaiki infrastruktur di wilayah tersebut. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, dalam penelitian ini ditemukan hasil yang mengejutkan, yaitu bahwa meskipun terjadi peningkatan DTKD, DD, dan PAD, tingkat kemiskinan di daerah tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor di luar dana anggaran, seperti kebijakan pemerintah yang tidak efektif, sistem birokrasi yang tidak transparan, dan masalah sosial seperti konflik dan kekerasan, dapat memainkan peran yang lebih penting dalam mempertahankan tingginya tingkat kemiskinan. Penting untuk diingat bahwa kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti konflik dan kekerasan.

Konflik dan kekerasan dapat terjadi di daerah yang memiliki ketidakstabilan politik atau sosial, sehingga dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah tersebut. Selain itu, konflik dan kekerasan juga dapat membuat

warga miskin menjadi lebih rentan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola dana anggaran dengan baik dan menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mengambil tindakan yang tepat dalam mengatasi konflik dan kekerasan di wilayah mereka.

Dalam hal ini, peran aktif masyarakat dan lembaga-lembaga sosial juga sangat penting untuk membantu mengatasi faktor-faktor sosial yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Secara keseluruhan, penanganan kemiskinan tidaklah mudah karena melibatkan banyak faktor dan kompleksitas yang berbeda di setiap daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi kemiskinan di wilayah mereka, termasuk pengelolaan dana anggaran, transparansi dan akuntabilitas, serta faktor-faktor sosial seperti konflik dan kekerasan. Oleh karena itu, dalam pembangunan wilayah, pemerintah perlu memperhatikan tidak hanya faktor anggaran, tetapi juga faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi efektivitas program pembangunan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa sistem birokrasi yang digunakan untuk melaksanakan program pembangunan transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi penggunaan dana. anggaran. Selain itu, pemerintah perlu bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk memecahkan masalah sosial yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa penggunaan anggaran belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan, pemerintah daerah perlu melakukan anggaran yang berimbang antara pembiayaan infrastruktur wilayah dan faktor-faktor lain yang rawan menyebabkan kemiskinan seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.

Keterlibatan masyarakat dalam penganggaran dan pengawasan penggunaan dana-dana yang diperoleh wilayah harus disosialisasi, terutama oleh tingkat pemerintahan yang di atasnya. Misalnya pemerintahan kabupaten mensosialisasikan pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan keuangan di tingkat kecamatan, dan pemerintahan kecamatan mensosialisasikan pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia merasa tidak memiliki hak atas pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah lokal, kecuali ada pihak yang lebih tinggi mendukung. Menurut para peneliti, pengukuran kemiskinan yang hanya berfokus pada dimensi kekurangan sumber daya material tidaklah cukup untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kemiskinan. Sebaliknya, pengukuran yang mencakup semua lima dimensi dapat memberikan pandangan yang lebih utuh dan memungkinkan pengambilan tindakan yang lebih efektif dalam mengatasi kemiskinan. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan untuk menggunakan landasan pernyataan Chambers dalam pengukuran kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdullah, R. (2022). Pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Gorontalo. *JAMBURA: Economic Educational Journal*, 4(2): 165-176.
- [2] Adriawan, R., Rahman, A. dan Iwang, B. (2022) Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan. *Forum Ekonomi*, 24(1): 226-234.
- [3] Alvaro, R. dan Zahara, E.L. (2019) Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Budget*, 4(2): 106-124.
- [4] Chambers, R. (1987). *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta : LP3ES
- [5] Gusmeri., Fuad, Z., Herawati, N., Parmakope., Adnan, M., Nurhayati dan Utama, A.E. (2019). Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Banda Aceh: Bappeda.

- [6] Handra, H. (2022). Analisis Kebijakan Dampak Dana Desa Terhadap Kemiskinan, Perekonomian, Pengangguran, dan Pelayanan Publik Periode 2015-2019. Jakarta: Kompas.
- [7] Ismail, A. dan Hakim, A. (2014) Peran Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali. *Aplikasi Bisnis*, 16(9): 2168-2186
- [8] Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587. Jakarta: Sekretariat Negara. Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [9] Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41*.
- [10] Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295*. Mardiasmo (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- [11] Mas'ood, M. (1997) *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [12] Muhardinata. (2022). Pengaruh Dana Transfer dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Tesis Magister. universitas Sumatera Utara.
- [13] Nasikun. (2001) *Diktat Mata Kuliah. Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*. Magister Administrasi Publik. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- [14] Pasa, S.R., Kawung, G.M.V. dan Rorong, I.P.F. (2023) Analisis Pengaruh Pad Dan Dana Transfer Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Ke Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 24(1): 80-94.
- [15] Salim, E. (1980). *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan*. Jakarta: Idayu.
- [16] Sigit, T.A. dan Kosasih, A. (2020). Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(2): 105-119. DOI: 10.33105/itrev.v5i2.170
- [17] Sukanto., Juanda, B., Fauzi, A., dan Mulatih, S. (2018) *Dampak Dana Transfer dan Peran Kelembagaan terhadap Kinerja Pembangunan di Provinsi Banten*. Dissertation. Institut Pertanian Bogor.
- [18] Suroso (2020). Kebijakan Pembangunan Desa Tertinggal Berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) dan Potensi Lokal. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*, 16(1),pp. 47-62